

BAB 1

PENDAHULUAN

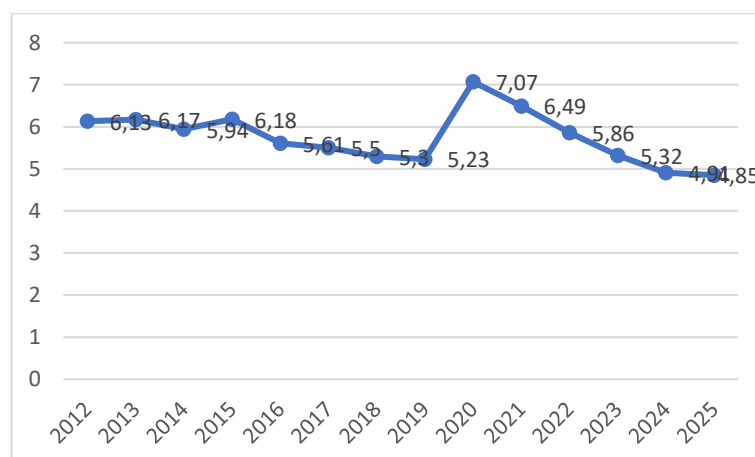
1.1. Latar Belakang

Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diidentifikasi melalui peningkatan berbagai indikator ekonomi yang dimilikinya. Indikator tersebut tercermin dalam dua konsep utama, yaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua konsep tersebut memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong terjadinya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Capaian pembangunan ekonomi suatu negara dapat dianalisis melalui berbagai indikator perekonomian yang tersedia, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Besar atau kecilnya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat menggambarkan kondisi perekonomian negara tersebut, apakah berada dalam keadaan berkembang, mengalami perlambatan, atau bahkan mengalami penurunan (Fakhruqi, 2020).

Indonesia merupakan negara berkembang yang diklasifikasikan berdasarkan standar hidup penduduknya. Dimana masalah pembangunan ekonomi yang sering dihadapi oleh negara berkembang yaitu bertambahnya jumlah pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran dapat menghambat proses pembangunan ekonomi karena menunjukkan bahwa sebagian angkatan kerja belum terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi. Dalam kondisi makroekonomi, pengangguran tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat,

tetapi juga dapat memicu berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya produktivitas ekonomi. Upaya untuk menekan tingkat pengangguran menjadi salah satu fokus penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS, 2022). Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja belum mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat upah, serta perkembangan investasi di suatu daerah.

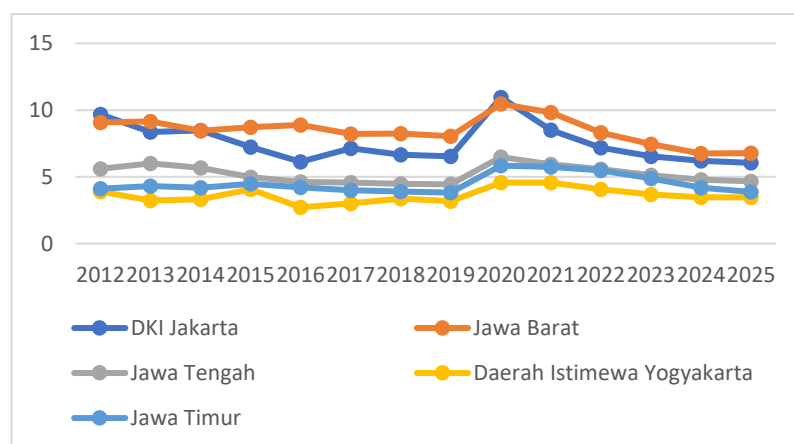


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2012-2025

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2012-2025 menunjukkan fluktuasi. Dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 7,07%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Namun, pada tahun 2021-2025 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan yang konsisten dari 6,49% menjadi 4,85%.

Meskipun secara nasional tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan yang cukup serius di tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik ekonomi, struktur industri, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja di masing-masing wilayah. Hal ini dapat diilustrasikan melalui pengamatan data terkait tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selama rentang waktu 2012-2025, sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa (Persen)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa mengalami fluktuasi antara tahun 2012-2025. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama pada tahun 2012-2025, tingkat pengangguran tersebut tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2012-2025.

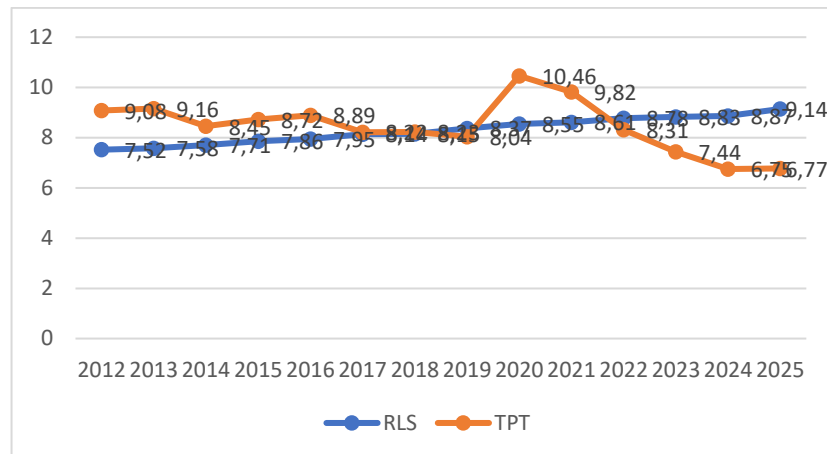
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kebijakan ketenagakerjaan, serta perkembangan investasi di daerah. Salah satu faktor yang berperan penting dalam memengaruhi tingkat pengangguran adalah pendidikan. Pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan individu dalam memasuki dan bertahan di pasar tenaga kerja. Dalam perspektif teori *human capital*, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin baik pula kapasitas dan kompetensi yang dimiliki sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan juga semakin besar.

Secara teoritis, pendidikan sebagai investasi modal manusia berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dapat memperkecil peluang menjadi pengangguran. Namun, dalam praktiknya hubungan antara

pendidikan dan pengangguran tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten. Variabel tingkat pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah. Menggunakan variabel tersebut karena periode yang lebih lama meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan dan berkualitas. Di Provinsi Jawa Barat, peningkatan rata-rata lama sekolah tidak diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran yang stabil, bahkan cenderung fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2025.

Peningkatan rata-rata lama sekolah secara signifikan terjadi sepanjang tahun 2012-2025 mencapai 9,14%. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak secara langsung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka. Bahkan, pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka tercatat mengalami peningkatan sebesar 10,46% akibat dampak pandemi COVID-19, sementara rata-rata lama sekolah masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah membutuhkan waktu untuk memberikan efek terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Namun, jika terjadi penurunan rata-rata lama sekolah, maka dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Dalam kondisi rendahnya tingkat pendidikan, maka produktivitas tenaga kerja juga cenderung rendah yang dapat mengakibatkan perusahaan menghadapi kesulitan untuk membayar upah sesuai dengan standar upah minimum kabupaten/kota karena produktivitas tenaga kerja tidak sebanding dengan tingkat upah yang harus dibayarkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Filiasari & Setiawan (2021) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan menurut Pangestu (2020) rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan dan negatif.

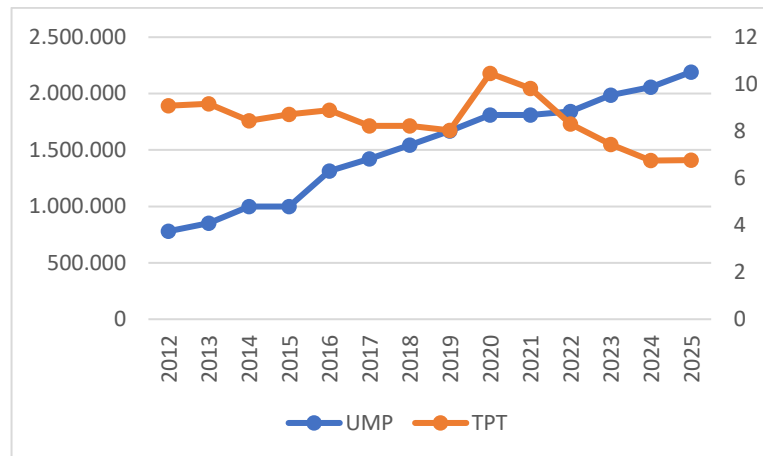


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Gambar 1.3 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pekerja agar mendapatkan penghidupan layak (UU Cipta Kerja dan PP 51/2023). Grafik tren upah minimum provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan selama periode 2012-2025, perkembangan tingkat pengangguran terbuka tidak selalu bergerak sejalan dengan peningkatan upah minimum. Secara teoritis, teori upah efisiensi menjelaskan bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong perluasan kesempatan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran. Di Provinsi Jawa Barat pada beberapa periode kenaikan upah minimum justru disertai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum

berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Serta dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tingkat investasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Gambar 1.4 Perbandingan Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025

. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Utomo (2023) ditemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Filiarsari & Setiawan (2021) ditemukan bahwa upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Terdapat perbedaan hasil analisis antara dua penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya celah riset. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka.

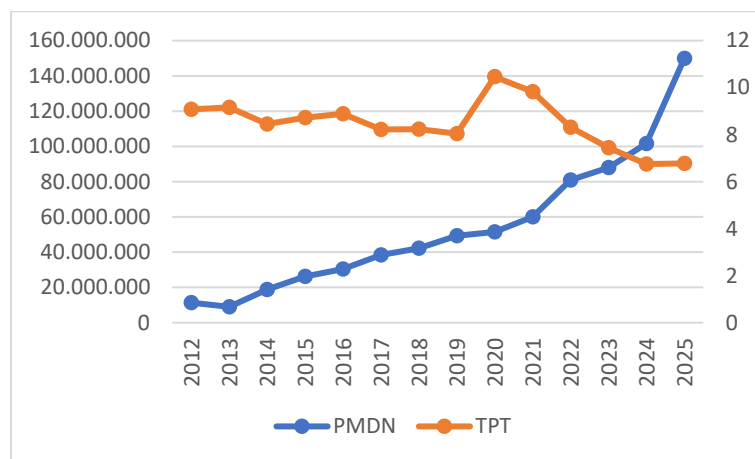
Investasi pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah merupakan kegiatan penempatan sejumlah dana atau modal yang bersumber dari pemerintah untuk mendukung kegiatan pembangunan dan perekonomian. Investasi swasta merupakan penempatan dana atau modal

yang berasal dari pihak atau perusahaan swasta. Investasi swasta dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan penanaman modal yang seluruh sumber dananya berasal dari dalam negeri dan diinvestasikan pada kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Sebaliknya PMA merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Salim HS & Sutrisno (2008), PMA umumnya tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, manajemen, serta jaringan pasar internasional yang dapat memengaruhi struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja secara berbeda dibandingkan dengan PMDN. PMDN memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan perekonomian lokal dan berpotensi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Secara teoritis, menurut teori investasi keynes, investasi merupakan salah satu komponen utama dalam permintaan agregat yang dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, serta mendorong pertumbuhan sektor jasa dan industri. Kondisi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

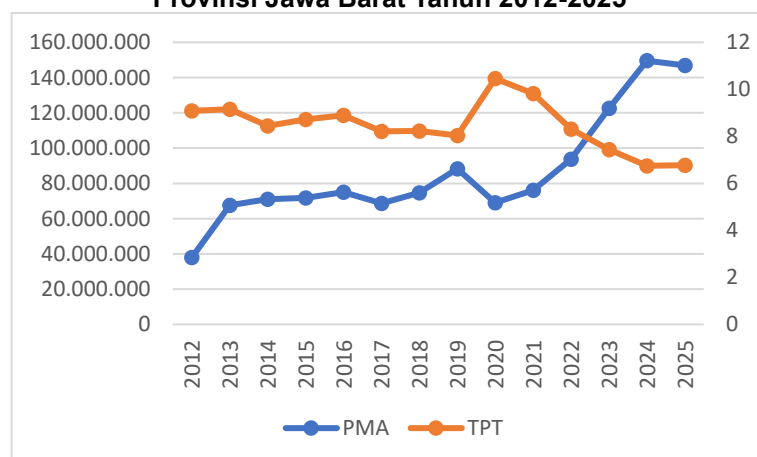
Berdasarkan gambar 1.5 dan 1.6 hasil perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa selama periode 2012-2025, nilai PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PMDN meningkat

dari Rp. 11,38 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 149,84 triliun pada tahun 2025. Demikian pula, PMA meningkat dari Rp. 37,89 triliun menjadi Rp. 146,98 triliun pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan adanya kepercayaan dari para investor terhadap kondisi usaha di Provinsi Jawa Barat, serta potensi ekonomi daerah yang menjanjikan.



Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Gambar 1.5 Perbandingan PMDN dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025



Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Gambar 1.6 Perbandingan PMA dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025

Seperti yang diketahui bahwasanya dalam praktiknya di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 PMDN dan PMA mengalami peningkatan

diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran karena sebagian investasi yang masuk cenderung padat modal sehingga penggunaan teknologi lebih dominan dibandingkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2024) ditemukan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan menurut Fatimah & Utomo (2023) ditemukan bahwa investasi dalam negeri tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2021) ditemukan bahwa variabel PMA berpengaruh positif terhadap TPT. Sedangkan, menurut Elvana & Soeharjoto (2020) ditemukan bahwa PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas, terdapat beberapa celah riset penelitian yang perlu diatasi untuk memperdalam pemahaman mengenai topik ini. Celah riset pertama, studi sebelumnya belum mengkaji secara spesifik pengaruh pendidikan, upah minimum kabupaten/kota, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Celah riset kedua, penelitian terdahulu belum memanfaatkan data terkini khususnya data dari periode 2012-2025. Celah riset ketiga, terdapat

perbedaan hasil analisis sehingga hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menunjukkan apakah variabel pendidikan, upah minimum kabupaten/kota, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing itu berpengaruh positif atau negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan fenomena empiris dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2025.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan masalah penelitian yang menjadi dasar analisis. Rumusan masalah tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025?
2. Apakah upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025?
3. Apakah penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025?

4. Apakah penanaman modal asing (PMA) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan fokus pada hal-hal berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025.
3. Menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025.
4. Menganalisis pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2025.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai urgensi permasalahan pengangguran terbuka, serta memberikan pemahaman mengenai pengaruh pendidikan, upah minimum kabupaten/kota, penanaman modal dalam

negeri, dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2012-2025.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi maupun sumber data yang relevan bagi instansi yang terkait, khususnya dalam mendukung proses pengambilan Keputusan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperkaya literatur dalam bidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan.